

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai permulaan, bab ini akan menarasikan bagaimana landasan dari konsep dasar dan metodologi penelitian yang dilakukan secara terstruktur dan komprehensif. Pembahasan pertama dalam bab ini akan berfokus seputar permasalahan penelitian yang akan dijelaskan dalam latar belakang dan mempertegas di bagian rumusan masalah, Dari sini, saya menemukan urgensi, tujuan, dan manfaat dari penelitian yang saya lakukan. Setelah menemukan permasalahan, maka akan dijelaskan bagian landasan teori yang akan digunakan untuk meninjau topik ini yang diteliti dalam penelitian terdahulu. Selain itu, dalam bab ini juga akan membahas mengenai metode penelitian yang menjelaskan mengenai proses berlangsungnya penelitian, mulai dari pertimbangan jenis penelitian, pemilihan lokasi dan waktu, penentuan informan, hingga analisis data.

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan pada masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan melalui beberapa bantuan yang diberikan, seperti halnya bantuan-bantuan sosial yang akhir-akhir ini menjadi topik yang cukup banyak diperbincangkan. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki masalah kemiskinan, maka program-program bantuan pemerintah diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Permasalahan seputar kemiskinan sudah menjadi permasalahan yang krusial bagi sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia (Sianturi, Syafii, & Tanjung, 2021). Masalah kemiskinan sendiri dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, baik dalam kebutuhan primer maupun sekunder. Kemiskinan merupakan persoalan hak asasi manusia dan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)¹ menekankan pentingnya pemenuhan HAM (Hak Asasi Manusia)²

¹ TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan): Agenda pembangunan global dan nasional yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015 untuk diterapkan hingga tahun 2030.

² HAM (Hak Asasi Manusia): Hak dasar manusia yang harus dipenuhi agar seseorang bisa hidup layak, dan kemiskinan menunjukkan bahwa hak tersebut belum terpenuhi.

dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Purwaningsih, 2022). Sedangkan, kemiskinan sendiri dianggap sebagai suatu hal yang terjadi secara turun temurun atau suatu hal yang diwariskan atau dapat disebut sebagai kemiskinan berkelanjutan, sehingga dapat disebut dengan budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan disebabkan oleh terjadinya *Porsistent poverty* yaitu kemiskinan yang telah kronis dan turun temurun (Yulianda, Maifizar, & Sopar, 2021).

Desa Malangan menjadi salah satu desa yang menerima bantuan sosial baik berskala nasional seperti halnya PKH maupun bantuan sosial tingkat lokal yang menjadi program desa itu sendiri. Penduduk di Desa Malangan rata-rata bekerja di sektor *non* formal seperti halnya sebagai petani maupun buruh tani dan beraktivitas di lahan persawahan. Hasil panen dari lahan persawahan umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik untuk dikonsumsi maupun untuk dijual. Penduduk dengan pekerjaan atau penghasilan yang tidak pasti setiap hari atau setiap bulannya menjadikan mereka masuk ke dalam kategori miskin, meskipun mereka memiliki aset baik yang berupa lahan persawahan maupun lain sebagainya. Di Desa Malangan sendiri, fasilitas pendidikan dipenuhi mulai dari adanya fasilitas pendidikan paud maupun taman kanak-kanak yang terdapat di beberapa dukuh di Desa Malangan, hingga terdapat tiga fasilitas pendidikan sekolah dasar di desa tersebut. Selain itu, di tingkat kecamatan juga terdapat fasilitas pendidikan baik dari sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Meskipun masih banyak penduduk masuk ke dalam kategori miskin, tetapi dalam hal pendidikan baik dari jenjang awal hingga akhir pendidikan wajib sudah difasilitasi baik dari desa maupun kecamatan setempat.

Dari masalah kemiskinan tersebut maka peran pemerintah dalam memberikan solusi atas permasalahan kemiskinan ini cukup diharapkan menjadi kunci. Oleh karena itu, pemerintah merancang program bantuan sosial yang diberikan secara khusus dengan syarat tertentu. Program bantuan sosial yang diberikan kepada mereka dengan syarat khusus yaitu Program Keluarga Harapan (PKH)³. PKH merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin, jika mereka memenuhi syarat yang terkait dengan upaya

³ PKH (Program Keluarga Harapan).

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)⁴, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Sitorus, Rares, & Plangiten, 2020). Program Keluarga Harapan merupakan program Kementerian Sosial yang dibantu oleh Dinas Sosial setempat. Bantuan Sosial PKH ini menjadi salah satu jalan bagi setiap keluarga dengan kondisi ekonomi tidak stabil atau keluarga miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok.

Proses awal penentuan calon penerima bantuan ditentukan melalui data-data yang sudah dimasukkan oleh pihak desa, seperti halnya nama, alamat, kepemilikan aset seperti tanah, rumah, emas, motor, dan lain sebagainya. Pada awalnya pendataan program PKH melalui DTKS⁵ (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan saat ini mengalami perubahan dengan menggunakan sistem DTSEN⁶ (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) yang dibantu oleh pihak BPS⁷ (Badan Pusat Statistik) melalui sistem perangkaan. Dulu, calon penerima bantuan hanya warga yang berstatus kurang mampu atau miskin, tetapi saat ini seluruh warga atau penduduk masuk ke dalam sistem calon penerima bantuan dan masuk ke dalam perangkaan yang menggunakan desil. Bagi calon penerima bantuan yang terpilih biasanya berada di posisi desil 1-4.

Pada awalnya, proses berjalannya program bantuan sosial PKH berjalan dengan cukup baik dengan melihat ke arah keluarga-keluarga yang memiliki keadaan ekonomi kurang atau bahkan tidak stabil yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan pokok. Dalam program tersebut terdapat ketentuan-ketentuan khusus, yang mana hal tersebut harus dipenuhi oleh setiap anggota penerima bantuan. Selain harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), anggota penerima bantuan sosial PKH umumnya keluarga yang sudah memiliki anak dengan rentan usia balita, SD, SMP, hingga SMA. Persyaratan yang diajukan bagi penerima PKH yaitu dalam pendidikan (anak penerima PKH harus terdaftar di lembaga sekolah dan sedang melanjutkan pendidikan), dan kesehatan (bagi ibu hamil dan balita harus mengikuti pelayanan kesehatan, seperti posyandu) (Muliana, Mursyid, & Siregar, 2021). Selain itu, syarat utama dalam penerimaan bantuan PKH yaitu tidak

⁴ SDM Sumber Daya Manusia (Penerima Bantuan PKH).

⁵ DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial): Hanya warga dengan status miskin yang masuk pendataan.

⁶ DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional): Seluruh warga masuk ke dalam pendataan.

⁷ BPS (Badan Pusat Statistik): Melakukan perangkaan yang menghasilkan desil.

sedang dalam menerima bantuan sosial lainnya sehingga penerimaan bantuan sosial program pemerintah dapat merata sesuai dengan data dan kebutuhan masyarakat.

Bantuan Sosial PKH menjadi salah satu bantuan yang cukup banyak diterima oleh masyarakat di Desa Malangan, menurut data desa terdapat 247 KK⁸ sebagai penerima bantuan PKH. Maka dari itu, dari penelitian ini akan melihat bagaimana pola calon penerima dan penerimaan bantuan PKH hingga bagaimana pemanfaatan bantuan tersebut dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada dasarnya, pola penerimaan calon penerima bantuan tidak jauh dari keterlibatan beberapa pihak yang memiliki hubungan sosial. Di dalam hubungan sosial maka akan tercipta adanya interaksi sosial dan pada akhirnya berada pada titik terbentuknya hubungan sosial yang terjalin antara masyarakat dengan pihak desa atau masyarakat dengan pihak pendamping PKH. Pemanfaatan bantuan PKH juga dipengaruhi oleh adanya interaksi sosial yang terjalin antara masyarakat sebagai penerima bantuan dan pihak yang berhubungan langsung dengan pemilik kebijakan bantuan PKH.

Namun, pada kenyataannya dengan adanya bantuan sosial PKH tidak hanya membawa dampak positif bagi penerima tetapi juga membawa dampak negatif seperti halnya sikap ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial yang mereka terima nyatanya menjadi penghambat tujuan dibentuknya program bantuan tersebut, yang mana kini bantuan-bantuan sosial yang berasal dari program pemerintah nyatanya tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan diawal. Kini, seiring berjalannya waktu bantuan-bantuan sosial tersebut juga membawa dampak kurang baik bagi masyarakat, seperti halnya mulai munculnya sikap ketergantungan hingga terbentuknya kemiskinan berkelanjutan yang semakin berkembang di dalam masyarakat. Serta bagaimana fenomena tersebut berdampak pada mentalitas masyarakat miskin sehingga menciptakan ketergantungan dan menjadi hambatan dalam upaya mereka keluar dari jerat kemiskinan (Haliim & Hakim, 2024).

Mereka bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah yang telah diberikan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka baik dalam kebutuhan pokok

⁸ Wawancara dengan Mas Yoga (Petugas Operator Desa).

maupun kebutuhan konsumtif. Pada dasarnya bantuan sosial PKH merupakan bantuan yang rutin diterima oleh KPM⁹ (Keluarga Penerima Manfaat) dengan jumlah yang sama setiap tahapnya atau bahkan lebih dengan sistem penebalan bantuan. Anggota penerima bantuan sosial PKH di Kelompok 7 umumnya juga berasal dari keluarga kurang mampu, yang mana orang tua atau saudaranya juga sebagai penerima bantuan yang sama, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai kemiskinan berkelanjutan. Kemiskinan berkelanjutan, yaitu kemiskinan yang berlangsung lama atau turun-temurun di wilayah yang terisolasi atau bergantung pada sumber daya alam yang kritis (Juliansyah, Khoffifah, Khoiriyah, & Daryono, 2024)

Munculnya sikap ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial PKH berawal dari pemikiran bahwasannya diri mereka sulit untuk dapat berkembang, memiliki rasa tidak percaya diri, hingga usaha yang mereka lakukan untuk bisa lebih baik adalah yang tidak membuahkan hasil. Mereka beranggapan bahwa usaha untuk meraih kesuksesan adalah sia-sia atau terlalu sulit (Haliim & Hakim, 2024). Dari hal tersebut dapat dilihat bahwasannya sikap ketergantungan masyarakat sudah tertanam dalam diri mereka, sehingga mereka sulit untuk mencoba berbagai upaya atau usaha untuk bisa keluar dari jerat kemiskinan yang berantai yang mengakibatkan kemiskinan berkelanjutan.

Munculnya sikap ketergantungan yang nyatanya menjadi bentuk kemiskinan berkelanjutan bagi penerima bantuan sosial PKH, karena tidak mampuan mereka dalam mengelola dana bantuan untuk mengembangkan diri untuk dijadikan sebagai jalan keluar dari jerat kemiskinan. Ketergantungan tersebut maka membentuk harapan-harapan untuk terus dan tetap mendapatkan bantuan, sehingga mereka sebagai penerima bantuan memiliki strategi agar tetap berstatus sebagai penerima bantuan dan mendapatkan dana bantuan secara rutin.

Kelompok 7 menjadi salah satu kelompok dengan anggota penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Desa Malangan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Sebagian besar anggota penerima bantuan PKH hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan domestik, sesekali mereka bekerja sebagai pekerja buruh dan suami yang bekerja sebagai petani, buruh tani,

⁹ KPM (Keluarga Penerima Manfaat): Orang yang menerima bantuan sosial.

buruh batu, dan pekerjaan informal lainnya. Tetapi, anggota Kelompok 7 PKH Desa Malangan tidak hanya beranggotakan ibu rumah tangga tetapi juga seorang ayah yang bekerja di sektor informal. Kelompok tersebut memiliki agenda rutin, seperti pertemuan atau rapat yang dilakukan satu bulan sekali yang wajib dihadiri oleh setiap anggota kelompok 7 penerima bantuan sosial PKH. Adapun sosialisasi yang sering dilakukan antara lain, kelengkapan syarat penerima bantuan, seperti mengadakan pertemuan di setiap bulannya apabila terdapat perubahan tentang PKH, pertemuan dan rapat juga ditujukan agar terjadinya komunikasi yang baik antara pelaksana PKH dan masyarakat penerima PKH (Anwar & Untari, 2020).

Syarat dan ketentuan PKH harus dipenuhi oleh setiap anggota penerima bantuan sosial PKH, seperti halnya juga harus melakukan kontrol terhadap anak-anak penerima PKH dalam proses pembelajaran dan kehadiran siswa di sekolah. Dalam melakukan pemutakhirandata pendamping PKH setiap tiga bulan melakukan kunjungan ke sekolah untuk melakukan proses control terhadap kehadiran siswa (Kahrudin, 2020). Setiap kegiatan yang dilaksanakan kelompok PKH akan didampingi oleh koordinator kelompok PKH. Pendamping kelompok 7 PKH berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang turut hadir di setiap rapat hingga menjadi pembimbing bagi setiap anggota PKH jika mengalami kendala dalam proses penerimaan bantuan. Penerima bantuan sosial PKH umumnya anggota keluarga ibu atau ayah yang sudah memiliki anak dengan rentan usia balita atau masih duduk di bangku sekolah TK-SMA.

Bagi anggota penerima bantuan sosial yang memiliki anak dengan rentan sudah di bangku perguruan tinggi dan sudah bekerja maka sudah tidak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH atau harus graduasi secara mandiri karena dalam ekonomi menengah ke atas agar bisa memberikan kesempatan kepada keluarga yang lebih membutuhkan. Dorongan internal dan KPM untuk graduasi mandiri di antaranya menolak bantuan karena merasa mampu, tidak ingin bergantung pada bantuan sosial PKH, dan/atau ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain (Nurhayati, 2024). Pada umumnya anggota penerima bantuan PKH enggan untuk melakukan graduasi secara mandiri, hal tersebut salah satunya disebabkan oleh sikap ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang telah diterima. Meskipun

ekonomi penerima PKH sudah dalam keadaan stabil nyatanya tidak menjadi pendorong bagi mereka untuk melakukan graduasi.

Komponen dengan persentase paling besar terdapat pada kelompok pelajar, sehingga penerima bantuan PKH sebagian besar memiliki anak yang berstatus sebagai pelajar. Informasi yang terlibat sebagian besar memiliki unsur penerima PKH yang berasal dari komponen pelajar (81,30%), kemudian disusul lansia (11,75%), serta balita dan ibu hamil (Sofianto, 2020). Seiring berjalannya waktu, kini dapat dilihat mulai munculnya sikap ketergantungan penerima PKH kelompok 7 yang membentuk rantai kemiskinan berkelanjutan. Mereka menganggap bantuan yang mereka terima cukup menjanjikan untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok, tidak hanya itu uang bantuan yang mereka terima juga memenuhi kebutuhan lainnya di luar kebutuhan pokok. Dari hal tersebut terdapat hal yang cukup menarik yaitu munculnya sikap ketergantungan pada anggota penerima bantuan sosial yang melakukan berbagai upaya agar tidak kehilangan sumber dana yang menjadi penyokong kebutuhan sehari-hari mereka, salah satu upaya yang dilakukan adalah memiliki anak lebih dari satu.

Pada penelitian ini tidak hanya membahas bagaimana proses calon penerimaan bantuan sosial PKH dan pemanfaatan dana bantuan yang diterima oleh KPM, tetapi juga akan membahas mengenai dampak relasi penerima dengan lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya bantuan sosial tersebut ditujukan untuk mereka agar dapat bangkit dari masa sulit, namun pada kenyataannya setiap keluarga memiliki prioritas dan kebutuhan masing-masing sehingga hal tersebut juga mampu memengaruhi pengalokasian atau pemanfaatan dana bantuan yang mereka terima. Terdapat pola *prestation and canalization* yang terjalin antara penerima bantuan KPM, pendamping, dan pihak desa yang terjalin secara langsung dan tidak langsung yang juga memengaruhi pemanfaatan dana bantuan. Pengalokasian dana bantuan yang tidak sesuai dengan aturan program yang sudah ditentukan merupakan salah satu hasil dari adanya pola *prestation* yang terjalin antara pendamping dan KPM.

Program Keluarga Harapan (PKH) selama ini dipahami sebagai salah satu instrumen kebijakan sosial yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun, pada kenyataannya

pelaksanaan program bantuan sosial PKH di Desa Malangan tidak hanya melibatkan penyaluran bantuan secara administratif, tetapi dengan adanya bantuan tersebut mampu membentuk relasi sosial yang kompleks antar pihak yang terlibat di dalam program bantuan tersebut seperti halnya antar penerima, pendamping, hingga pihak desa. Relasi yang terbangun tersebut maka mampu memperlihatkan adanya interaksi, negosiasi, hingga penyesuaian aturan yang tidak selalu berjalan secara formal.

Mengingat bahwasannya PKH merupakan program bantuan bersyarat yang memiliki aturan dan kewajiban di dalamnya, sehingga pihak yang berperan di dalam program tersebut harus menjalankan atau mematuhi aturan tersebut. Namun, pada dasarnya aturan dan kewajiban dalam program bantuan sosial PKH mampu menjadi ruang pertukaran atau negosiasi bagi pihak-pihak yang terlibat. Mereka mampu memberikan dan mendapatkan keuntungan satu sama lain, yang mana pendamping mampu memberikan kelonggaran aturan dan penerima bantuan atau KPM mampu memberikan sikap kepatuhannya terhadap aturan dan kebijakan yang ada, yang mana aturan dan kewajiban yang diberikan pendamping tersebut sudah disesuaikan dari hasil negosiasi yang sudah berjalan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari adanya ruang pertukaran dan negosiasi maka akan menghasilkan ruang aman bagi pihak yang bersangkutan, baik pendamping, KPM, atau pihak desa.

Selain program bantuan sosial PKH yang menjadi program bantuan sosial berskala nasional, terdapat bentuk bantuan sosial lain yang disalurkan di tingkat lokal, salah satunya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa¹⁰. Program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah desa dalam upaya pengentasan kemiskinan yang lebih kontekstual dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Di Desa Malangan, BLT Dana Desa diberikan kepada masyarakat yang dianggap memenuhi kriteria tertentu dengan nominal bantuan Rp 300.000-, per bulan. Pada tahun 2025, jumlah penerima BLT Dana Desa tercatat sebanyak 39 orang, sementara pada tahun 2026 terdapat 11 penerima tambahan¹¹. Keberadaan program BLT Dana Desa ini menunjukkan bahwa praktik bantuan sosial tidak

¹⁰ BLT Dana Desa: Bantuan tingkat lokal yang diberikan desa kepada warga dengan status miskin.

¹¹ Berdasarkan data Desa Malangan

hanya bersifat *top-down* melalui program nasional seperti halnya PKH, tetapi juga hadir dalam skema lokal yang memiliki karakteristik, mekanisme, dan implikasi sosial yang berbeda.

PKH tidak hanya dipahami sebagai kebijakan bantuan sosial yang berjalan berdasarkan aturan formal dari negara, tetapi PKH juga mampu menjadi ruang interaksi sosial yang di dalamnya terdapat tawar-menawar antara berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, yang mana hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kepentingan individu. Untuk memahami lebih dalam mengenai dinamika tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan *trancation model* yang dikembangkan oleh Fredrik Barth pada *Models of Social Organization 1966*¹², yang menekankan bahwa praktik sosial dibentuk melalui proses pertukaran yang terus-menerus dinegosiasikan, dan hal tersebut tidak hanya melalui kepatuhan terhadap aturan yang terdapat dalam program tersebut. Dalam konteks PKH, maka bantuan tersebut tidak hanya hadir sebagai pendukung ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi pemicu terbentuknya hubungan transaksional yang melibatkan kepatuhan administratif, kehadiran dalam kegiatan, hingga pengakuan terhadap otoritas pendamping sebagai bagian dari pertukaran sosial yang berlangsung.

Melalui konsep *prestation*, maka Barth menunjukkan bahwasannya setiap relasi sosial menjadi bentuk pemberian dan pengorbanan, baik yang bersifat material maupun *non* material. Pada praktik program bantuan sosial PKH, maka *prestation* tidak hanya terlihat dalam penyaluran bantuan tunai oleh negara, tetapi juga dapat dilihat dari kepatuhan penerima terhadap kewajiban program, seperti halnya mengikuti pertemuan rutin kelompok, melakukan laporan, dan mempertahankan status keanggotaan. Kepatuhan yang dijalankan dalam program bantuan sosial PKH tidak selalu dijalankan secara kaku atau formal sesuai dengan kebijakan yang berjalan, yang mana aturan yang berjalan dalam program tersebut sering dinegosiasikan sesuai dengan kondisi lapangan. Di sisi lain, konsep *canalization* membantu dalam menjelaskan bagaimana pertukaran tersebut diarahkan dan dibatasi melalui peran pendamping yang berperan sebagai perantara utama antara pihak pusat dengan penerima bantuan atau KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Pendamping tidak hanya berperan dalam menyampaikan aturan program,

¹² Fredrik Barth, *Models of Social Organization* (London: Royal Anthropological Institute, 1966).

tetapi juga berperan dalam mengelola kelonggaran, toleransi, hingga penyesuaian agar program tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pendamping, sehingga pendamping juga mendapatkan keuntungan atas posisinya. Maka dari itu, proses dan pemanfaatan bantuan sosial PKH tidak dapat dilepaskan dari relasi transaksional yang bersifat dinamis, yang mana aturan formal, kepentingan antar individu, hingga praktik lapangan saling terhubung satu sama lain.

Pendekatan tersebut menjadi relevan karena pelaksanaan program bantuan sosial PKH di lapangan menunjukkan bahwasannya proses penerimaan bantuan, pemanfaatan bantuan, keberlanjutan keanggotaan, hingga proses graduasi tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh adanya indikator formal. Pada dasarnya proses tersebut dibentuk melalui interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dan dinegosiasikan oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, PKH dapat dipahami sebagai praktik sosial yang memiliki penuh makna di dalamnya sehingga dapat dilihat bahwasannya kebijakan negara mampu berinteraksi dengan adanya strategi bertahan hidup dan kepentingan sosial. Melalui proses transaksi yang terkanalisasi oleh aturan, laporan, hingga mekanisme kelembagaan program PKH, maka aktor-aktor yang terlibat melakukan kalkulasi rasional untuk memaksimalkan keuntungan yang tidak selalu bersifat material, tetapi mereka memaksimalkan keuntungan seperti halnya rasa aman, fleksibilitas, dan stabilitas relasi sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melihat lebih dalam mengenai program PKH yang tidak hanya berjalan sebagai program bantuan sosial, tetapi juga melihat program PKH sebagai ruang pertukaran antar pihak yang terkait. Maka dari itu, pendekatan *prestation and canalization* digunakan untuk mengungkap bagaimana bantuan sosial PKH dimaknai, dimanfaatkan, dan dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari baik oleh penerima, pendamping sosial, hingga pihak desa terkait dalam kehidupan sehari-hari, dan melihat bagaimana proses yang ada di dalamnya berkontribusi pada pola ketergantungan penerima bantuan dan dinamika keanggotaan pada Kelompok 7 dalam program bantuan sosial PKH.

1.2 Rumusan Masalah

Bantuan sosial menjadi salah satu bentuk langkah masyarakat untuk menangani kemiskinan yang saat ini semakin tinggi, sehingga terdapat beberapa jenis program bantuan sosial yang dibuat pemerintah untuk masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah. Salah satu bantuan sosial program pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH, yang mana penerima bantuan ini adalah seorang perempuan yang menjadi ibu rumah tangga. Bantuan ini ditujukan untuk membantu ekonomi keluarga melalui seorang istri, dan bantuan ini dikhususkan untuk ibu hamil, ibu rumah tangga yang sudah memiliki anak yang sedang aktif di bangku sekolah, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dikhususkan untuk bisa menjadi penerima bantuan sosial PKH.

Bantuan sosial PKH nyatanya tidak hanya membawa dampak baik bagi masyarakat sebagai penerimanya, tetapi bantuan tersebut juga bisa membawa dampak yang kurang baik bagi penerima. Seperti halnya muncul sikap ketergantungan penerima atas bantuan yang selama ini mereka terima secara rutin, sehingga menimbulkan beberapa dampak yang kurang baik bagi penerima dan keluarga, seperti menurunnya motivasi untuk bekerja karena sudah bergantung pada bantuan yang mereka terima secara rutin dan menganggap hal tersebut sebagai gaji dari pemerintah. Bantuan sosial PKH sebagian besar juga mampu memenuhi kebutuhan penerimanya, bahkan bantuan yang diterima bisa lebih besar dibanding gaji mereka ketika bekerja. Berdasar dengan fenomena tersebut, penelitian ini mencoba untuk menguak jawaban dari pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerima bantuan sosial PKH di Desa Malangan dilihat dari perspektif *canalization*?
2. Bagaimana pemanfaatan dana bantuan sosial PKH oleh penerima bantuan dilihat dari perspektif *prestation*?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada narasi sebelumnya dan urutan masalah yang ingin diketahui, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk bisa menganalisis dan mengidentifikasi fenomena ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial PKH. Selain itu, penelitian ini juga ingin menganalisis proses dan pemanfaatan penerimaan bantuan

PKH dari pihak pemerintah hingga diterima oleh masyarakat penerima bantuan. Dengan hal tersebut, untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam penelitian ini akan mempelajari hal penting untuk memenuhi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis proses pemilihan penerima bantuan sosial PKH di Desa Malangan melalui perspektif *canalization*.
2. Memahami dan mengidentifikasi pemanfaatan dana bantuan sosial PKH oleh penerima bantuan melalui perspektif *prestation*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu Antropologi Sosial, khususnya dalam memahami bagaimana dinamika sosial yang muncul diakibatkan oleh adanya bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang bantuan sosial yang mampu mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat. Hasil temuan dalam penelitian ini dapat menjadi landasan pengetahuan yang kuat, membuka peluang bagi penelitian lanjutan dalam topik yang sama, serta mampu menjadi referensi bagi ilmuwan untuk analisis yang lebih kritis.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam kajian ilmu Antropologi Sosial untuk mengkaji lebih dalam mengenai program bantuan sosial, khususnya program bantuan sosial PKH pada konteks pola pemanfaatan bantuan. Dalam penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana fenomena pola pemanfaatan yang tepat dan tidak tepat terhadap bantuan sosial PKH dan dampak yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan bidang kebijakan sosial, khususnya dalam analisis ilmu Antropologi.

1.4.3 Manfaat Sosial

Pada penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya pengelolaan bantuan sosial yang tidak hanya berfokus pada bantuan finansial tetapi juga bisa dalam bentuk lain, seperti halnya bantuan dalam pembangunan kapasitas dan bantuan dalam pemberdayaan individu yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini juga dapat menjadi wawasan bagi masyarakat tentang bagaimana pentingnya beralih dari sikap ketergantungan terhadap bantuan sosial menuju ke kemandirian ekonomi, maka dari hal tersebut masyarakat menjadi termotivasi untuk tidak lagi bergantung pada bantuan sosial dan mulai mencari solusi lain untuk dapat mencapai kesejahteraan.

1.5 Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, di mana penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| No | Penulis & Judul | Tujuan | Metode & Teori | Kesimpulan |
|----|---|--|--|---|
| 1. | Penulis: Vania Grace Sianturi, M. Syafii Ahmad Albar Tanjung. Judul: Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). | Mengidentifikasi variabel-variabel ekonomi dan sosial yang berpengaruh terhadap kemiskinan, mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing faktor tersebut, dan memberikan gambaran empiris sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah dalam upaya | Metode: Analisis regresi dana panel dengan alat analisis. Eviews10. Teori: Pembangunan. | PKH dianggap sebagai salah satu program yang digunakan untuk meningkatkan IPM, tetapi dalam pelaksanaannya program PKH masih ditemukan beberapa permasalahan jika tidak ditangani dengan seirus dan baik maka akan membawa dampak negatif terhadap IPM. Jadi, program PKH sendiri tidak |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | pengentasan kemiskinan. | | hanya mampu membawa dampak positif tetapi juga dampak negatif yang akan kembali ke penerima program tersebut. |
| 2. | <p>Penulis: Wimmy Haliim & Andy Ilman Hakim.</p> <p>Judul: Ketergantungan Masyarakat Miskin dan Dilema Kebijakan Sosial: Studi Pada Implementasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan.</p> | Mengkaji tingkat ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan PKH, mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari program bantuan sosial PKH, dan menganalisis dilema yang dihadapi dalam kebijakan sosial antara meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kemandirian. | <p>Metode: Kualitatif, penelitian mendalam wawancara.</p> <p>Teori: <i>Poverty theory</i>, <i>dependency theory</i>, dan <i>social policy theory</i>.</p> | Penerima bantuan PKH perlu diberikan edukasi mengenai pengolahan dana bantuan, sehingga dana bantuan yang diterima dapat menjadi modal awal kemandirian mereka dan keluar dari lingkup kemiskinan. Penggunaan dana yang bijak juga menghindarkan mereka dari perilaku konsumtif, dan dari kemandirian ekonomi mereka juga dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. |
| 3. | <p>Penulis: Faizal Anwar & Nanik Untari.</p> <p>Judul: Analisis Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Program Keluarga Harapan.</p> | Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan bantuan Program Keluarga Harapan serta ingin mengetahui apa saja faktor yang menghambat dalam | <p>Metode: Kualitatif, dengan pengkajian deskriptif dalam bentuk uraian.</p> <p>Teori: Implementasi kebijakan publik, kebijakan sosial, dan kemiskinan.</p> | Keberjalanan program PKH nyatanya membutuhkan SDM dan fasilitas yang mendukung, sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai. Seperti halnya, jika masyarakat memiliki |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | | pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mesigit. | | kesadaran yang kurang dalam memanfaatkan bantuan yang diterima maka akan menjadi penghambat keberjalanan program tersebut. |
| 4. | <p>Penulis: M. Robby Kaharudin.</p> <p>Judul: <i>Social Safety Net</i> Pada Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kota Palembang.</p> | Untuk menilai efektivitas PKH dalam membantu kebutuhan dasar masyarakat miskin, mengkaji dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima, dan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program di lapangan. | <p>Metode: kualitatif, penelitian deskriptif sesuai dengan fakta di lapangan, serta menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.</p> <p>Teori: <i>Social safety net</i>.</p> | Penggunaan biaya bantuan sosial umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti halnya untuk membeli makanan bergizi untuk menunjang kesehatan keluarga, serta kebutuhan pendidikan, seperti halnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak membeli buku, sepatu, tas, dan keperluan lainnya. Sehingga, dana bantuan sosial tidak disalah gunakan untuk memenuhi kebutuhan yang hanya meningkatkan sikap konsumtif yang berlebih. |
| 5. | <p>Penulis: Juliansyah, Khoffifah, Khoiriyah, Daryono.</p> <p>Judul: Pengembangan Sumber Daya</p> | Menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi kualitas SDM dan hubungannya dengan tingkat | <p>Metode: Kualitatif deskriptif.</p> <p>Teori: <i>Human capital theory</i>.</p> | Kemiskinan yaitu salah satu masalah utama yang menjadi prioritas untuk dapat diatasi, sehingga muncul berbagai program |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | Manusia dalam Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Timur. | kemiskinan di wilayah tersebut. | | dan kebijakan untuk dapat memutus tali kemiskinan masyarakat, salah satunya program bantuan sosial PKH. Namun, kualitas sumber daya manusia menjadi garis besar dalam permasalahan kemiskinan, karena jika memiliki SDM yang berkualitas maka akan lebih mudah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Contoh kecilnya, jika mendapatkan bantuan maka digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, bukan malah disalah gunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak penting. |
| 6. | <p>Penulis: Evi Nurhayati.</p> <p>Judul: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Mencapai Graduasi Mandiri KPM PKH Di Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang</p> | Mengkaji peran dan fungsi pendamping sosial dalam pelaksanaan PKH, menilai kontribusi pendamping dalam mendorong kemandirian KPM, dan mengidentifikasi hambatan yang | <p>Metode: Deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan</p> | Peran pendamping PKH cukup penting dalam memberikan motivasi terhadap anggotanya, baik dalam menyampaikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan maupun penyampaian tentang |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | Utara Kabupaten Sumedang. | dihadapi dalam proses pendampingan. | studi dokumentasi. Teori: <i>Role theory.</i> | perencanaan usaha untuk dapat mencapai kemandirian ekonomi. Pendamping juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap anggota penerima bantuan sosial PKH, pasalnya bagi penerima bantuan yang sudah mampu berkembang dan sudah memiliki kemandirian ekonomi maka dianjurkan untuk melakukan graduasi mandiri atau keluar dari salah satu penerima bantuan PKH, sehingga program bantuan dapat bergulir ke masyarakat lain yang lebih membutuhkan. |
| 7. | Penulis: Lia Muliana, Mursyidin, Muharriyanti Siregar. Judul: Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan | Menilai perubahan kondisi ekonomi dan sosial keluarga setelah menerima PKH, mengukur peningkatan kesejahteraan, dan mengidentifikasi sejauh mana program PKH efektif dalam membantu keluarga miskin. | Metode: Kualitatif dengan pendekatan. Teori: Teori kesejahteraan sosial dan <i>policy impect theory.</i> | Penerima bantuan sosial PKH harus memenuhi persyaratan, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan PKH yaitu dalam masa pendidikan, anak penerima bantuan harus terdaftar di lembaga sekolah dan sedang melanjutkan pendidikan, serta |

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| | Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. | | | pada ibu hamil dan balita harus terdaftar dalam mengikuti pelayanan kesehatan seperti posyandu. |
| 8. | Penulis: Brain Fransisco Supit & Elvis Lumingkewas. Judul: Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan Uatara Minahasa. | Mengkaji proses pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan, dan menemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program. | Metode: Penelitian kualitatif. Teori: Implementasi kebijakan publik. | Pada dasarnya bantuan sosial akan tetap membawa dampak positif dan negatif bagi penerima bantuan, di mana dampak positifnya yaitu mambu membantu masyarakat miskin untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan dampak negatifnya yaitu masyarakat mulai muncul budaya ketergantungan dan sifat malas karena telah menganggap bantuan yang diterima sebagai gaji yang didapatkan secara rutin. |

Berdasarkan rangkaian penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka dapat dilihat bahwasannya kajian mengenai PKH sejauh ini masih banyak menekankan pada pemanfaatan dana, efektivitas program, dampak yang akan terjadi, hingga faktor sosial ekonomi yang memengaruhi penerima. Meskipun dalam penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran yang sudah cukup jelas mengenai bagaimana bantuan digunakan, tetapi belum ada yang melihat program PKH dari lingkup kehidupan sehari-hari penerima bantuan, khususnya melalui pendekatan etnografi. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebelumnya

cenderung bersifat deskriptif atau studi kasus tanpa medalami atau menyoroti secara mendalam bagaimana pola interaksi, cara penerima bernegosiasi dengan pendamping, hingga dinamika hubungan sosial yang terbentuk antara penerima bantuan dan pendamping. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dan konsep *prestation and canalization* dalam *transaction model* yang dikembangkan oleh Barth, yang mana penelitian ini berupaya dalam menekankan bahwa PKH bukan hanya sekedar bantuan sosial dari pemerintah, namun juga sebagai praktik sosial yang berlangsung dalam keseharian warga Desa Malangan, yang mana strategi, keputusan, dan relasi mampu memengaruhi bagaimana bantuan tersebut akhirnya dimanfaatkan.

1.5.2 Landasan Teori

PKH merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah yang bertujuan untuk mengeluarkan masyarakat dari masalah kemiskinan. Sebagian besar penerima bantuan sosial PKH terbantu dengan adanya bantuan tersebut, mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya dari dana bantuan yang sudah mereka dapatkan. Pada penelitian ini didasari oleh Teori *Transaction Model* dengan konsep *prestation and canalization* yang dikembangkan oleh Fredrik Barth, teori ini akan menjadi salah satu cara untuk bisa memahami bagaimana hubungan yang tercipta diantara kekuasaan, ekonomi, dan masyarakat penerima bantuan. *Transaction model* yang dikemukakan oleh Fredrik Barth (1966) memandang masyarakat sebagai hasil dari proses interaksi dan transaksi yang berjalan secara dinamis.

Hubungan sosial dalam masyarakat tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang statis atau sepenuhnya ditentukan oleh struktur, melainkan sebagai hasil dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh aktor dalam dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan *Transaction Model* yang dikembangkan oleh Barth menjelaskan bahwasannya bentuk-bentuk sosial tidak hanya hadir sebagai struktur yang berdiri sendiri, tetapi hal tersebut merupakan hasil dari akumulasi pilihan dari individu yang terlibat di dalamnya. Struktur sosial dalam pandangan ini dibentuk dan direproduksi melalui adanya tindakan aktor-aktor yang secara aktif mengambil keputusan berdasarkan kepentingan, posisi, dan situasi yang mereka hadapi.

Dalam konteks program bantuan sosial PKH, maka pendekatan ini menjadi relevan karena pelaksanaan program tidak hanya berjalan berdasarkan aturan formal yang ditetapkan oleh negara, tetapi sebaliknya PKH dijalankan melalui adanya interaksi sehari-hari antara pendamping, aparat desa (administratif), ketua kelompok, dan KPM. Masing-masing aktor yang terlibat tersebut bertindak sebagai individu yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented*), dan mereka juga terus-menerus melakukan perhitungan rasional terkait keuntungan dan resiko dari tindakan yang mereka ambil.

Barth menekankan bahwasannya dalam situasi sosial tertentu, maka individu akan cenderung melakukan kalkulasi rasional untuk memaksimalkan nilai yang dapat didapatkan, baik dalam bentuk material maupun non material. Maka dalam program bantuan sosial PKH, kalkulasi tersebut tidak selalu berkaitan secara langsung dengan uang atau materi, tetapi juga berkaitan dengan adanya rasa aman, proses administrasi yang lancar, stabilitas relasi sosial, hingga keberlanjutan status sebagai penerima bantuan sosial .

Oleh karena itu, dalam kerangka *transaction model* terdapat konsep *prestation and canalization*. Transaksi dalam antropologi kadang disebut sebagai *prestation*. Konsep *prestation* merujuk pada tindakan individu dalam melakukan transaksi sosial untuk memperoleh keuntungan tertentu. Dalam konteks ini, "keuntungan" tidak selalu bersifat ekonomi atau terlihat secara langsung, tetapi dapat berupa rasa aman, keberlanjutan akses, maupun posisi sosial tertentu. Maka dari itu, *prestation* tidak hanya dipahami sebagai pertukaran yang bersifat material, tetapi juga mencakup berbagai strategi yang dilakukan individu dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. *Prestation* menempatkan individu sebagai aktor yang aktif dan memiliki rasionalitas dalam bertindak. Individu tidak sekadar menerima kondisi yang ada, melainkan berupaya menyesuaikan tindakan mereka agar tetap memperoleh manfaat dari situasi yang dihadapi. Dalam konteks bantuan sosial, *prestation* dapat terlihat dari bagaimana penerima manfaat bantuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga sebagai upaya untuk mempertahankan keberlanjutan bantuan tersebut, meskipun tindakan tersebut tidak selalu tampak sebagai bentuk kebutuhan secara langsung.

Sementara itu, konsep *canalization* dalam *transaction model* merujuk pada proses pengarahan tindakan individu melalui aturan, mekanisme, dan struktur sosial yang ada. *Canalization* tidak hanya berfungsi sebagai batasan atau "kanal" yang membatasi tindakan, tetapi juga sebagai mekanisme yang mengarahkan bagaimana individu dapat bertindak dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks yang lebih luas, *canalization* mencakup berbagai aspek, mulai dari proses penentuan penerimaan bantuan, keanggotaan, hingga dalam pemanfaatan dana bantuan yang telah diterima. Maka dari itu, *canalization* tidak hanya bekerja dalam tahap awal program, tetapi terus bekerja dalam setiap tahapan program. Setiap individu memiliki ruang untuk bertindak, tetapi tindakan tersebut tetap berada dalam kerangka aturan dan mekanisme yang telah ditentukan. Sehingga, *canalization* dapat dipahami sebagai proses yang tidak hanya membatasi, tetapi juga mengarahkan dan membentuk kemungkinan tindakan individu, termasuk dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, bagaimana status keanggotaan dipertahankan, dan bagaimana bantuan tersebut dapat dimanfaatkan.

Seiring berjalannya waktu, dengan menggunakan konsep *prestation and canalization* maka dapat melihat bahwasannya fakta di lapangan ketentuan atau aturan program di lapangan. Seperti halnya, aturan mengenai nota yang menjadi bukti pembayaran, di mana penerima bantuan harus menyertakan bukti pembayaran sebagai pengeluaran dalam penggunaan dana bantuan. Penerima bantuan harus menyertakan bukti pembayaran tersebut kepada pendamping, hal tersebut bertujuan agar pendamping bisa melihat apakah dana bantuan digunakan dengan tepat atau tidak. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini akan mencapai hasil yang optimal apabila penyaluran bantuannya dapat dipastikan tepat sasaran dan tepat guna, menghindari kebocoran dan kesalahan target (Nasriyani, 2025).

Namun, saat ini pada akhirnya aturan tersebut tidak lagi berjalan, sehingga memungkinkan penggunaan bantuan sosial PKH yang tidak tepat. Selain itu, penerima bantuan sosial yang wajib menghadiri pertemuan rutin dan terdapat maksimal izin, namun pada kenyataannya pertemuan rutin tersebut dapat diwakili oleh orang lain yang masih memiliki hubungan keluarga dan tidak diharuskan bagi penerima itu sendiri untuk menghadiri pertemuan rutin PKH. Fleksibilitas tersebut mampu dipahami sebagai hasil dari adanya penyesuaian strategi kedua aktor yang

menjadi penerima bantuan dan pendamping, yang mana sebagai penerima bantuan mampu memahami cara kerja dari program tersebut, sedangkan pendamping yang juga lebih memahami bagaimana kondisi sosial dari penerima bantuan sosial PKH. Adanya perubahan aturan tersebut semata-mata bukan pembebasan penerima bantuan terhadap aturan program, namun sebagai bentuk adaptasi dari hubungan sosial antar pihak yang lebih stabil dan efektif.

1.5.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian sebelumnya, serta adanya landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proses dan pemanfaatan bantuan sosial PKH, yang mana hal tersebut berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada proses keberjalanan program PKH baik dalam pemilihan penerima bantuan yang tepat hingga proses pencairan dana dari pusat hingga ke masyarakat penerima, dan pemanfaatan dana bantuan yang digunakan oleh penerima bantuan PKH. Dengan menggunakan *transaction model* dari Fredrik Barth, maka penelitian ini memandang bahwasannya interaksi di dalam program bantuan sosial PKH menjadi rangkaian transaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam antropologi transaksi kadang disebut dengan *prestation*. Transaksi tersebut tidak hanya selalu dalam bentuk pertukaran material secara langsung, tetapi juga melibatkan pertukaran simbolik, kewajiban, kepatuhan administratif, hingga toleransi terhadap penyimpangan aturan. Dalam hal ini, bantuan sosial PKH tidak hanya berdiri sebagai pemberian sepihak tetapi juga menjadi bagian dari relasi timbal balik antara aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

Pada tahap awal, konsep *canalization* membantu dalam membaca bagaimana kebijakan program PKH dari pusat membentuk jalur-jalur atau kanal-kanal tindakan yang relatif kaku. Dalam program terdapat aturan mengenai pendataan, syarat keanggotaan, kewajiban, hingga mekanisme pencairan bantuan yang berfungsi sebagai saluran resmi yang mampu mengarahkan perilaku penerima dan pendamping. Barth menegaskan bahwa transaksi selalu terjadi dalam kanal-kanal pranata sosial atau *canalization*. Pada konsep *canalization* mampu menciptakan kerangka normatif tentang bagaimana seharusnya program PKH dijalankan, siapa yang berhak menerima bantuan, hingga bagaimana bantuan

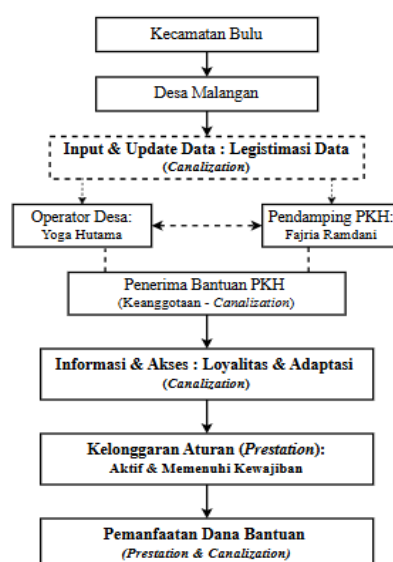
tersebut dimanfaatkan. Namun, dalam praktik di lapangan jalur atau kanal tersebut tidak selalu berjalan secara kaku, yang mana peran konsep *prestation* menjadi penting untuk bisa membaca lebih dalam mengenai dinamika yang muncul di tengah-tengah program tersebut. Pendamping dan penerima bantuan terlibat dalam berbagai bentuk penyesuaian, kompromi, hingga negosiasi yang bersifat situasional. *Prestation* dalam konteks program PKH tidak selalu memiliki makna pertukaran yang setara, pada satu sisi penerima bantuan menunjukkan kepatuhan simbolik sebagai bentuk balasan terhadap keberlanjutan bantuan yang diterima, dan di sisi lain pendamping melakukan *prestation* dengan memberikan fleksibilitas, perlindungan, dan penyesuaian terhadap kebijakan program.

Dalam jangka panjang, maka *canalization and prestation* akan membentuk berbagai paradoks dan kontradiksi dalam program PKH, yang mana program yang dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi justru dapat menciptakan ketergantungan. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya pemanfaatan PKH tidak hanya dapat dipahami sebagai hasil dari desain kebijakan, tetapi juga sebagai hasil dari proses transaksi sosial yang kompleks. Maka dari itu, kerangka berpikir dalam penelitian ini menempatkan program bantuan sosial PKH sebagai ruang sosial dengan *canalization* kebijakan negara terus-menerus dinegosiasikan melalui praktik *prestation* para aktor. Selain itu, program bantuan sosial PKH tidak hanya dimaknai sebagai kebijakan yang ditujukan untuk mendorong kemandirian ekonomi tetapi terdapat bentuk transaksi atau *prestation* di dalamnya, sehingga hal tersebut mampu memengaruhi keberjalanan dan keberlanjutan program. Pendekatan ini memungkinkan untuk membaca lebih dalam dan kritis mengenai bagaimana proses, manfaat, hingga keanggotaan dalam program PKH yang dibentuk melalui interaksi antara struktur program dan tindakan strategis para aktor yang terlibat di dalamnya.

Fokus dalam penelitian ini tidak hanya pada apa yang diberikan oleh program kepada masyarakat, tetapi juga pada bagaimana bantuan tersebut dimaknai, dipertukarkan, dan dipertahankan dalam relasi sosial sosial antara penerima bantuan dan pendamping PKH. Pendamping PKH merupakan manusia biasa yang memiliki karakteristik pribadi dan sosialnya masing-masing yang dapat mendukung atau bahkan menghambat berjalannya suatu program atau kegiatan

yang akan dilakukan oleh pendamping (Nadilla, Nurwati, & Santoso, 2022). Oleh karena itu, variabel yang dirumuskan dalam penelitian ini dituangkan menjadi kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka dan Alur Penelitian



Gambar 1.1 merupakan bagian yang diteliti dalam penelitian dengan mencari tahu variabel independen, variabel dependen, serta variabel antara yang saling berkaitan satu sama lain.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi penting karena benar atau tidaknya akan menentukan hasil, kualitas, efisiensi, penggunaan sumber daya, dan relevansi penelitian. Pada poin ini, akan menjabarkan metode yang akan diterapkan dan menjadi dasar selama penelitian ini berlangsung, dari awal hingga akhir penulisan.

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya dalam kasus proses dan pemanfaatan bantuan sosial

PKH. Etnografi melibatkan pengamatan partisipatif dan interaksi dengan sumber penelitian dalam konteks budaya atau lingkungan tertentu (Sumbodo & et al., 2024). Metode pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, observasi langsung, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Observasi langsung dilakukan untuk dapat melihat secara langsung bagaimana pola kehidupan sehari-hari penerima bantuan PKH pada Kelompok 7 di Desa Malangan. Wawancara mendalam dilakukan untuk dapat memperoleh informasi secara langsung dari penerima bantuan PKH Kelompok 7 sebagai informan yang akan menyampaikan pengalamannya sebagai penerima bantuan.

Data yang didapatkan dari wawancara mendalam maka akan direkam, dicatat, dan dianalisis dalam bentuk transliterasi, yang merupakan representasi tertulis dari wawancara tersebut. Berkaitan dengan penelitian ini, nantinya pendekatan antropologi dan studi etnografi akan berkontribusi dalam mengidentifikasi proses hingga pemanfaatan bantuan sosial PKH bagi penerima bantuan di Desa Malangan khususnya di Kelompok 7. Selain itu, pendekatan antropologi dan studi etnografi akan membantu untuk memahami lebih dalam mengenai konsep *prestation and canalization* sosial yang membentuk ruang negosiasi, dan memahami bagaimana hal tersebut mampu membentuk ruang aman bagi pihak yang terkait dalam program PKH.

1.6.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian berfokus pada sebuah komunitas Kelompok 7 PKH di Desa Malangan. Kelompok 7 PKH merupakan salah satu kelompok penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan, yang mana Kelompok 7 sendiri terdiri dari dua dukuh yaitu Dukuh Ngoro Oro dan Dukuh Gunung Sudo yang berada di Desa Malangan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Lokasi penelitian tersebut dipilih karena Desa Malangan menjadi salah satu wilayah dengan penduduk yang berstatus penerima bantuan yang cukup tinggi, salah satunya adalah bantuan sosial PKH. Penelitian dilakukan dari Oktober 2025 hingga Januari 2026. Waktu penelitian telah disesuaikan dengan pertemuan dan kegiatan yang paling relevan dengan subjek penelitian. Rentang waktu tersebut dihitung dari masa awal saya melakukan penelusuran subjek dan informan potensial untuk penelitian.

Pada tanggal 4 Oktober 2025 saya akhirnya pertama kali mengontak ketua dari Kelompok 7 PKH Desa Malangan melalui Ibu Marsini. Setelah permohonan disetujui untuk melakukan pertemuan untuk melakukan wawancara, dan diskusi waktu dan tempat, wawancara pertama dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2025 di Rumah Mbak Nurhayati bersama dengan Mbak Nurhayati sendiri sebagai ketua kelompok. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan dan kesepakatan informan dengan peneliti. Lokasi dianggap strategis dan aman untuk peneliti dan informan dalam melakukan pertemuan. Kami menetapkan jam pertemuan wawancara pertama pada pukul 06.45 WIB. 15 menit pertama kita habiskan untuk berbincang mengenai hal-hal di luar dari pertanyaan penelitian, hal tersebut dilakukan untuk mengakrabkan diri dengan informan, sehingga informasi yang didapatkan tidak bersifat kaku. Wawancara selesai pada pukul 08.30 WIB.

Kemudian, pertemuan untuk wawancara kedua dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan dilakukannya wawancara pertama yaitu pada tanggal 5 November 2025 pada pukul 14.45 WIB. Lokasi Wawancara dilakukan di rumah Mbah Saminah, bersama dengan Mbah Saminah sendiri sebagai informan. Wawancara kedua ini dilakukan di depan rumah Mbah Saminah dengan obrolan yang santai, sebagai penerima bantuan PKH golongan lansia maka dengan teknik obrolan yang santai maka akan lebih menghasilkan data lapangan yang sesuai. Kami membuat janji temu pada pagi hari setelah melakukan wawancara dengan informan pertama, sehingga pada siang menjelang sore kami langsung bisa melaksanakan wawancara. Wawancara selesai sekitar pukul 15.30 WIB.

Wawancara ketiga dilaksanakan pada tanggal 5 Desember bersama Mas Yoga di Kantor Desa Malangan yang dihadiri oleh petugas desa lainnya yaitu Mas Putra. Saya pertama kali menguhungi Mas Yoga pada 2 Desember 2025 untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu mengenai penelitian yang akan saya lakukan. Saya mendapatkan akses kontak Mas Yoga dari sekretaris Desa yaitu Bapak Mariman. Konfirmasi yang saya lakukan bersama Mas Yoga akhirnya direspon dengan sangat baik, sehingga dapat melakukan perjanjian dan persetujuan untuk melakukan wawancara pada hari Jumat, 5 Desember 2025. Saya mulai berangkat dari Semarang untuk ke Kabupaten Sukoharjo pada pukul 04.30 WIB, wawancara disepakati pada pukul 09.00 WIB, pada akhirnya saya sampai di Desa Malangan

Kabupaten Sukoharjo pada pukul 07.00 WIB, sehingga saya bisa melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang sudah disetujui sebelumnya. Saat sampai di kantor desa, saya memperkenalkan diri pada waktu pertama sesi wawancara. Perbincangan dimulai dari hal-hal lain seputar kegiatan sehari-hari, hal tersebut dilakukan untuk menciptakan suasana yang cair dan tidak kaku. Wawancara dilakukan selama kurang lebih satu setengah jam. Dan wawancara selesai sekitar pukul 11.00 WIB.

Wawancara keempat dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2025 bersama Mbak Fajria selaku pendamping PKH di Desa Malangan khususnya di Kelompok 7, selain itu wawancara juga dilakukan bersama pendamping kelompok dari desa lain Mas Edward dan Mbak Sulis. Rencana pertemuan sudah dilakukan dari jauh-jauh hari, tetapi tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat karena Mbak Fajria yang biasa dipanggil dengan sebutan Mbak Faya sedang cuti kerja. Pada hari Senin, akhirnya Mbak Faya bisa ditemui dan kita berbincang di Kantor Kecamatan Bulu bersama dengan pendamping dari kelompok desa lain untuk sama-sama bertukar informasi. Wawancara dimulai pada pukul 09.00 WIB dan selesai sekitar pukul 11.00 WIB.

Wawancara kelima dilakukan di rumah Mbak Iswanti selaku anggota Kelompok 7 yang menerima bantuan sosial PKH. Wawancara dilakukan pada Sabtu 10 Januari 2026. Kita berbincang mengenai proses penerimaan PKH hingga pemanfaatan dana bantuan, Pada proses wawancara Mbak Iswanti juga sambil bekerja menjahit di kamarnya, setelah beberapa waktu kakak dari Mbak Iswanti datang dari tempat pengambilan plangkan atau bahan yang digunakan untuk membuat sarung dan kita berbincang bersama untuk bertukar informasi satu sama lain mengenai bantuan sosial PKH.

1.6.3 Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* atau sengaja, di mana hal tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam mengenai proses penerimaan bantuan sosial PKH dan pemanfaatan dana bantuan oleh KPM. Kriteria informan

dalam penelitian ini yaitu, merupakan anggota aktif Kelompok 7 PKH di Desa Malangan dan dalam menerima bantuan PKH.

Selain itu, informan juga telah menerima bantuan PKH selama minimal dua tahun, dan informan bersedia untuk memberikan informasi secara jujur dan terbuka mengenai pengalaman dan pandangannya terhadap dampak bantuan PKH yang mereka terima dalam kehidupan sehari-hari. Namun, untuk mendapatkan data yang lebih lengkap maka penelitian ini juga menggunakan informan utama dan pendukung seperti penerima bantuan sosial PKH atau anggota aktif Kelompok 7, pendamping kelompok, pihak desa, dan warga yang tidak lagi berstatus sebagai penerima bantuan PKH. Pemilihan informan tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait proses pelaksanaan dan pemanfaatan dana bantuan PKH dari berbagai perspektif.

Pemilihan informan yang berstatus penerima bantuan sosial PKH atau anggota aktif Kelompok 7 PKH Desa Malangan didasari pada posisi mereka sebagai pihak yang secara langsung menerima dan memanfaatkan bantuan, sehingga memiliki pengalaman empiris terkait proses pelaksanaan serta pemanfaatan bantuan PKH dalam kehidupan sehari-hari. Pendamping PKH dipilih sebagai informan karena memiliki peran langsung dalam proses pelaksanaan program, mulai dari pendataan, pendampingan, hingga pemantauan penerima bantuan. Selain itu, pendamping juga memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai mekanisme program serta dinamika yang terjadi di lapangan. Pemilihan 3 pendamping kelompok PKH sebagai informan bertujuan untuk bisa mendapatkan perspektif lain dari pendamping yang juga mendampingi kelompok dari desa lain.

Selanjutnya, pihak desa juga dilibatkan sebagai informan karena berperan dalam proses administratif dan penentuan data penerima bantuan. Desa dianggap sebagai pihak yang paling dekat dengan warga, sehingga dapat memberikan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat dan memberikan informasi mengenai pendataan penduduk miskin di Desa Malangan. Mantan penerima bantuan juga menjadi informan pendukung untuk melihat perubahan kondisi serta pengalaman setelah tidak lagi menerima bantuan PKH. Selain itu, keterlibatan penerima bantuan sosial PKH yang sudah tidak aktif mampu memberikan informasi mengenai proses graduasi atau pemberhentian dana bantuan yang sudah diterima

dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu, dengan melibatkan berbagai informan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan fenomena secara lebih utuh dan tidak hanya dari sudut pandang penerima bantuan, tetapi juga dari sudut pandang pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung untuk dapat melihat bagaimana aktivitas penerima bantuan PKH dalam kehidupan sehari-hari. Observasi langsung adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis (Effendi, Efendi, & Najib, 2021). Teknik observasi bertujuan untuk dapat memahami dan menganalisis secara kontekstual bagaimana pola sosial, dinamika, dan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks bantuan sosial. Dalam penelitian ini, maka dilakukan turun secara langsung mengikuti acara pertemuan rutin kelompok di Kelompok 7 untuk mengetahui keberjalanan acara secara langsung dan faktual.

Selanjutnya, untuk memperoleh berbagai jenis data primer yang dibutuhkan, penelitian ini akan menggunakan metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) diartikan sebagai proses mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian melalui proses tanya jawab langsung sambil bertatap mata dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara akan bersifat semi-terstruktur supaya peneliti dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut dari jawaban informan untuk menggali lebih banyak data dari deskripsi pengalaman maupun perspektif informan.

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan data dan informasi dengan mengadakan dialog secara langsung terhadap pihak yang berkompeten dan relevan dengan pembahasan dalam penelitian (Effendi, Efendi, & Najib, 2021). Dalam penelitian ini, teknik wawancara langsung yang dilakukan secara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari informan, baik informan utama yaitu anggota penerima bantuan PKH pada Kelompok 7 di Desa Malangan, maupun informan pendukung. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam untuk menggali informasi mengenai proses hingga pemanfaatan bantuan sosial PKH di Desa Malangan.

Selain itu, dalam, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti (Aditia & Merthayasa, 2023). Pada penelitian ini dibutuhkan teknik studi dokumentasi untuk digunakan sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui melalui hasil wawancara baik dengan pihak penerima bantuan, pihak pendamping, dan pihak desa. Studi dokumentasi yang menghasilkan dokumen pendukung dapat dijadikan sebagai data yang memperkuat data primer dan mampu memberikan gambaran historis yang berkaitan dengan keberjalanan program bantuan pada Kelompok PKH di Desa Malangan.

1.6.5 Analisis Data

Analisis data penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan dilakukan menggunakan model Miles & Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, displai data, dan kesimpulan. Dalam tahap reduksi, data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para informan akan diproses melalui proses transkrip untuk kemudian diolah, disusun, dan dirangkum oleh peneliti. Data dipilih berdasarkan data penting dan kurang penting sesuai dengan relevansi fokus pertanyaan penelitian. Data penting tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam beberapa kategori seperti, (1) proses pendataan dan pencairan bantuan; (2) dinamika sosial dalam pelaksanaan program; (3) pola transaksi sosial yang melibatkan antaraktor; (4) pemanfaatan bantuan oleh penerima bantuan. Langkah selanjutnya adalah penyusunan pola kronologi pengalaman dan interpretasi pengalaman informan dan hasil transkrip wawancara untuk menangkap esensi dan makna pengalaman tersebut.

Semua data penting yang telah disaring akan dipelajari dan dianalisis lebih lanjut di tahap displai data. Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam beberapa kategori seperti, (1) proses awal penerimaan bantuan; (2) peran desa dalam penerimaan bantuan, (3) peran pendamping, (4) ketentuan dan kewajiban penerima bantuan; (5) pemanfaatan dana bantuan; (6) konsekuensi pelanggaran; (7) proses *exclude* dan graduasi mandiri. Pada tahap tersebut, peneliti

mulai mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teori yang digunakan, sehingga terlihat bagaimana praktik di lapangan mencerminkan adanya transaksi sosial baik dalam bentuk *prestation* maupun *canalization*.

Hasil analisis data terstruktur akan menentukan kesimpulan. Tafsiran kategorisasi yang mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, digunakan untuk mencapai kesimpulan. Kesimpulan disusun secara bertahap dengan melihat keterkaitan antara proses pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan PKH, serta bagaimana keduanya mampu membentuk dinamika sosial di tingkat lokal. Adapun jenis pembuktian data dalam penelitian ini adalah transkrip wawancara.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis agar pembahasan penelitian mengenai budaya ketergantungan penerima bantuan PKH di Desa Malang, khususnya pada kelompok 7 dapat tersaji dengan runtut dan mudah untuk dipahami. Penulisan ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan pembahasan yang utuh.

BAB 1 merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Pada BAB 1 terdapat gambaran umum mengenai bantuan sosial PKH dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan bantuan sosial tersebut. BAB 2 berisi tentang Gambaran Umum yang menguraikan lokasi penelitian, pola kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat di Desa Malang, proses bagaimana perkembangan program PKH di masyarakat, gambaran mengenai kelompok sasaran penelitian, dan dinamika kehidupan penerima bantuan sosial PKH. BAB 3 membahas mengenai rumusan masalah pertama, yaitu mengenai bagaimana bantuan sosial PKH membentuk sikap ketergantungan yang menciptakan kemiskinan berkelanjutan pada penerima bantuan PKH Kelompok 7. BAB 4 menguraikan rumusan masalah kedua, yakni faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya budaya ketergantungan terhadap bantuan PKH pada penerima bantuan PKH Kelompok. Dan terakhir, BAB 5 yang berisi Kesimpulan yang memuat hasil temuan utama dalam penelitian dan saran yang dapat diberikan untuk penelitian maupun kebijakan selanjutnya